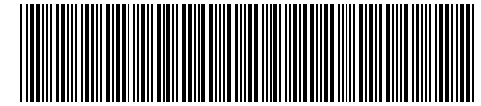




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.548941/2022**



DS:0741-4066-3163-4697

Revisi ke 04

Tanggal : 19 Oktober 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 4. Kode>Nama Satker : (548941) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
- Sebesar : Rp. 240.379.000 (DUA RATUS EMPAT PULUH JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.05.BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Jumlah Uang

Rp. 240.379.000
Rp. 240.379.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	196.700.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	43.679.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SURABAYA II (135) Rp. 240.379.000

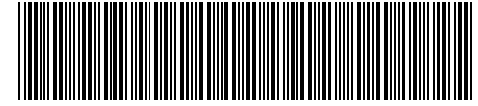
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 005.05.2.548941/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0741-4066-3163-4697

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (548941) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			240.379.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			240.379.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan TUN			
		2. 02	Jumlah Pengguna Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan TUN			
		3. 03	Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		4. 04	Jumlah Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang Mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial			
		5. 05	Jumlah Aparatur di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi			
		6. 06	Jumlah Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang Mengikuti Bimbingan Teknis Kepaniteraan			
		7. 07	Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun atau disempurnakan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1059.AEA	Koordinasi	5,00	kegiatan	102.820.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Pembinaan Pemeriksaan Yustisial	1,00	kegiatan	35.720.000
		02	AEA.002 Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan	3,00	kegiatan	62.600.000
		03	AEA.003 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,00	kegiatan	4.500.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1059.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	28,00	orang	137.559.000
Rincian Output	:	01	AEF.001 Bimtek/Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan PNBPN	14,00	orang	7.959.000
		02	AEF.002 Sosialisasi/Bimtek Kompetensi dan Administrasi Penyelesaian Perkara	14,00	orang	129.600.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Badilmitun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 005.05.2.548941/2022

I B. SUMBER DANA



DS:0741-4066-3163-4697

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (548941) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Halaman : I B. 1

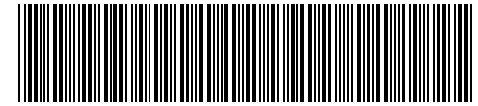
		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	240.379.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	196.700.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	43.679.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 005.05.2.548941/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0741-4066-3163-4697

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (548941) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
548941	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	-	240.379	-	-	-	240.379		
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	240.379	-	-	-	240.379		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	240.379	-	-	-	240.379		
1059.AEA	Koordinasi (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	102.820	-	-	-	102.820	05 . 51	
01	RM	-	67.100	-	-	-	67.100	135	
04	PNBP	-	35.720	-	-	-	35.720	135	
1059.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	137.559	-	-	-	137.559	05 . 51	
01	RM	-	129.600	-	-	-	129.600	135	
04	PNBP	-	7.959	-	-	-	7.959	135	
JUMLAH		-	240.379	-	-	-	240.379		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Badilimlun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 005.05.2.548941/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0741-4066-3163-4697

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (548941) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

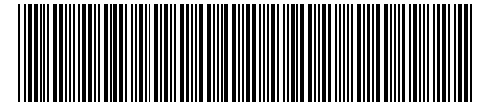
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	548941	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	21.056	27.989	164.008	0	0	19.164	7.959	203	240.379
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	21.056	27.989	164.008	0	0	19.164	7.959	203	240.379
	005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0	0	0	0	21.056	27.989	164.008	0	0	19.164	7.959	203	240.379
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	21.056	27.989	164.008	0	0	19.164	7.959	203	240.379

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Badilmitun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 005.05.2.548941/2022
IV A. B L O K I R**



DS:0741-4066-3163-4697

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [548941] PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

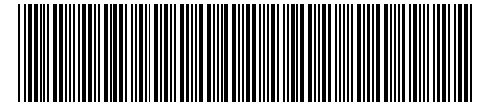
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Badilimlun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 005.05.2.548941/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:0741-4066-3163-4697

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [548941] PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Badilmitun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002